



UNIVERSITAS INDONESIA

**RANGKAP JABATAN NOTARIS DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN
NOTARIS**

TESIS

**DESSY DWI ASTUTY, S.H.
0706177375**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**RANGKAP JABATAN NOTARIS DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN
NOTARIS**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Kenotariatan**

**DESSY DWI ASTUTY, S.H.
0706177375**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Dessy Dwi Astuty

NPM : 0706177375

Tanda Tangan :

Tanggal : 31 Desember 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Dessy Dwi Astuty

NPM : 0706177375

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis : Rangkap Jabatan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotaritan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing: Chairunnisa Said Selenggang, S.H.,M.Kn (.....)

Penguji : Dr. Widodo Suryandono, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Darwani Sidi Bakaroeeddin, S.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 05 Januari 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Rangkap Jabatan Notaris Ditinjau dari Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

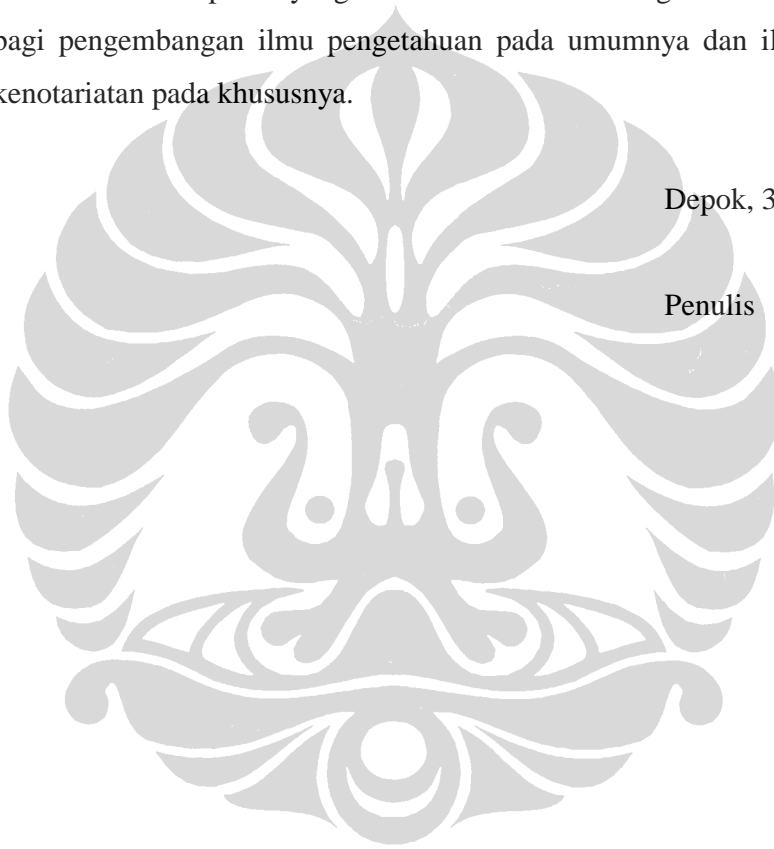
1. Ibu Chairunnisa Said Selenggang, SH., M.Kn., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
2. Bapak Dr. Drs., Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan selaku dosen penguji;
3. Ibu Darwani Sidi Bakaroeddin, S.H. selaku dosen penguji;
4. Para Notaris, anggota dan Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan: Bapak Eko Supono, Bapak Wartono, Notaris Tri Firdaus Akbarsyah, SH., M.Kn., Notaris Zulkifli, S.H., Notaris Mardiana, SH., Notaris Dendy Santoso, SH.;
5. Seluruh Staf Pengajar pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan seluruh Staf Administrasi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
6. Ayahanda dan Ibunda Penulis: Bapak H. Yasman Abdul Rauf, S.H, M.H., Ibu Hj. Nunsula serta kakak Penulis: Emmy Taurusia S.E., yang telah memberikan bantuan dukungan moral dan material;

7. Abang Rodi., S.T., atas dukungan moral dan dorongan semangat yang telah diberikan;
8. Para sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini: Feby, dan Sarah serta para sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
9. Kawan-kawan Penulis di Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2007.

Akhir kata, Penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu Hukum dan ilmu kenotariatan pada khususnya.

Depok, 31 Desember 2009

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah

ini:

Nama : Dessy Dwi Astuty

NPM : 0706177375

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Rangkap Jabatan Notaris Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”.

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 31 Desember 2009

Yang menyatakan

(Dessy Dwi Astuty)

ABSTRAK

Nama : Dessy Dwi Astuty
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Rangkap Jabatan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Tesis ini membahas tentang rangkap jabatan oleh notaris yang pengaturannya terdapat dalam Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. Larangan rangkap jabatan terhadap notaris sudah ada sebelum adanya Undang-undang Jabatan Notaris yaitu dalam Peraturan Jabatan Notaris (ord. stbl. 1860 no.3). Larangan tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan dan masalah-masalah hukum yang mungkin terjadi dan akan menyebabkan hilangnya kewibawaan dan profesionalisme seorang notaris. Akan tetapi, meskipun larangan tersebut sudah ada sejak lama namun pada kenyataannya masih saja ditemukan adanya notaris yang melakukan rangkap Jabatan. Di dalam kode etik profesipun disebutkan bahwa notaris harus mentaati Undang-undang yang berlaku. Sebagai sebuah profesi, jabatan notaris juga tidak boleh dirangkap dengan jabatan lain. Sehingga apabila masih ada notaris yang melakukan rangkap jabatan berarti ia telah melanggar Undang-undang, melanggar kode etik serta melanggar kriteria profesi menurut para ahli hukum. Masih adanya notaris yang melanggar aturan tentang rangkap jabatan, berkaitan erat dengan rendahnya nilai moral yang dimiliki oleh notaris tersebut. Selain itu pengaturan tentang rangkap jabatan yang terkesan masih setengah-setengah, sanksi yang tidak tegas, pengawasan yang tidak optimal terhadap notaris yang melakukan rangkap jabatan adalah alasan lainnya kenapa masih ada notaris yang melakukan rangkap jabatan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif artinya penelitian ini dilihat dari sisi normatif, yaitu penelitian terhadap keseluruhan data sekunder hukum. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu dilakukan revisi terhadap Undang-undang Jabatan Notaris terutama yang berkaitan dengan pengaturan rangkap jabatan yaitu apakah larangan rangkap jabatan ini akan tetap diterapkan atau dihapuskan saja agar tidak terkesan setengah-setengah dan tidak tegas.

Kata kunci: Rangkap Jabatan, Pengaturan Tentang Rangkap Jabatan Notaris.

ABSTRACT

Name : Dessy Dwi Astuty

Study Program: Magister of Notary

Title : Double Occupation of Notary Based on The Occupation of
Notary Law Number 30 Year 2004

The focus of this study is the regulation of double occupation by notary based on the Law of Notary's Occupation Number 30 Year 2004. The prohibition of double occupation of Notary has been regulated since The Regulation of Notary Occupation (ord. stbl. 1860 no.3) was valid. This prohibition shows that the double occupation should have been prohibited. The aims of the prohibition are to avoid the possibility of conflict of interest and other problems of law that might happen which can reduce the dignity and professionalism of Notary. However, although the prohibition has been regulated since a long time ago but we still can find the notary with double occupation in reality. Based on profession rules a notary must also obey the law. As a profession, a notary must not also be doubled with other occupation. That is why, if there are still some notaries do a double occupation that means they have not obey the law, the rules, ethic code, and criteria of profession that should be had by a notary as the law expert said. The fact that there are still some notary who do not obey the law must be connected to the low of moral of the notary. Beside, the inconsistent regulation, the unclear sanction, the unoptimal supervision to notary who do a double occupation are other reasons why notary with double occupation can still be found. This research is a normative juridical research which means this research is reviewed from the normative side, which is a research to all Law secondary data. The result of the research suggest that there must be a revision to the Law of Occupation of Notary especially the rules that connected to the regulation of double occupation whether it will still be applied or deleted in order to make the law more obvious and clear.

Key words: Double Occupation, The regulation of double occupation of Notary.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Metode Penelitian	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA & PEMBAHASAN	10
2.1 Pekerjaan dan profesi	10
2.2 Profesi Hukum	16
2.3 Pengertian Notaris.....	28
2.3.1 Pengertian Notaris Menurut Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (ord. stbl. 1860 no.3).....	33
2.3.2 Pengertian Notaris Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris:.....	34
2.3.3 Pendapat Tokoh-tokoh Notariat	35
2.4 Pengaturan Mengenai Rangkap Jabatan Bagi Notaris.....	38
2.4.1 Profesi-profesi dan pekerjaan-pekerjaan yang secara eksplisit dilarang untuk dirangkap oleh notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 30Tahun 2004.....	38
2.4.2 Profesi-profesi dan pekerjaan-pekerjaan yang secara implisit dilarang untuk dirangkap oleh notaris berdasarkan Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004.....	39
2.4.3 Rangkap Jabatan Dalam Pasal 11 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.....	39
2.4.4 Peranan Majelis Pengawas Notaris dalam menghadapi adanya notaris yang rangkap jabatan.....	40
2.4.5 Sanksi-sanksi yang diberikan terhadap notaris yang rangkap jabatan.....	53
2.5 Analisa hukum.....	54
BAB III PENUTUP.....	65
1. Kesimpulan	65
2. Saran	66
DAFTAR REFERENSI	68
LAMPIRAN	